

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Strategi yang diterapkan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTT) dalam mengatasi persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal telah mencakup tiga tahapan utama manajemen strategi, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Pada tahap formulasi, BP3MI telah mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal, di mana kekuatan utama terletak pada jejaring kerja sama lintas instansi, sementara kelemahan mencakup keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan minimnya kehadiran di desa-desa terpencil. Peluang eksternal yang bisa dimanfaatkan antara lain kerja sama dengan gereja, media lokal, serta dukungan peraturan. Di sisi lain, ancaman nyata berasal dari budaya migrasi ilegal yang mengakar, rendahnya pendidikan, serta tekanan ekonomi yang membuat masyarakat lebih memilih jalur non-prosedural.

Pada tahap implementasi, BP3MI Provinsi NTT berupaya menjalankan strategi melalui kegiatan nyata seperti sosialisasi dan edukasi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Salah satu inovasi yang dtelah dilakukan oleh BP3MI Provinsi NTT adalah menjadikan isu migrasi aman sebagai pesan dalam mimbar gereja, mengingat gereja memiliki peran strategis dan kehadirannya yang merata di desa-desa. BP3MI Provinsi NTT juga

menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah, NGO, serta aparat penegak hukum untuk memperluas jangkauan informasi dan pengawasan terhadap praktik pengiriman PMI ilegal. Meski demikian, keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan aktif dari pemerintah kabupaten/kota menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan strategi.

Evaluasi terhadap strategi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa capaian BP3MI masih belum optimal karena beberapa kendala internal seperti minimnya SDM dan anggaran, serta faktor eksternal seperti budaya migrasi ilegal, kemiskinan, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Untuk itu, tindakan korektif yang diperlukan adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan peran pemerintah daerah dan desa, serta menggunakan pendekatan pada kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan strategi yang tepat, evaluasi yang berkelanjutan, serta dukungan menyeluruh dari berbagai pihak, diharapkan angka PMI ilegal yang ada di Provinsi NTT dapat ditekan dan perlindungan terhadap pekerja migran dapat ditingkatkan secara signifikan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang peneliti berikan:

1. BP3MI Provinsi NTT harus lebih memperkuat kerja sama yang kolaboratif, khususnya dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, agar edukasi dan pengawasan terhadap migrasi ilegal dapat dilakukan secara

merata. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 yang membagi kewenangan perlindungan PMI ke semua jenjang pemerintahan. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan untuk bisa menindak tegas para calo atau agen ilegal yang masih aktif beroperasi di wilayah NTT.

2. BP3MI Provinsi NTT perlu mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan isu migrasi aman ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Sehingga dengan masuknya isu ini ke dalam agenda pembangunan daerah, maka alokasi anggaran dan perhatian dari pemda terhadap isu PMI ilegal akan lebih terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, perlu dikembangkan layanan informasi terpadu dan sistem pelaporan online yang mudah diakses masyarakat, sehingga calon PMI mendapatkan informasi resmi yang benar tanpa harus bergantung pada pihak ketiga atau calo.
3. BP3MI Provinsi NTT juga perlu melakukan penguatan internal organisasi, baik dalam hal penambahan personil, pelatihan sumber daya manusia, maupun pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang dapat mengukur efektivitas program secara berkala. Dengan penguatan kelembagaan, BP3MI Provinsi NTT akan lebih siap dalam menjangkau wilayah-wilayah rawan migrasi ilegal dan memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada masyarakat.

4. BP3MI Provinsi NTT disarankan untuk mulai memberikan pengetahuan tentang program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, bekerja sama dengan dinas terkait dan LSM, sebagai upaya pencegahan migrasi ilegal dari akar permasalahan. Dengan cara memberikan alternatif ekonomi yang lebih baik, sehingga diharapkan masyarakat tidak lagi tergiur oleh janji-janji kerja cepat dari calo ilegal. Semua saran ini diharapkan dapat membantu BP3MI Provinsi NTT dalam memperkuat strategi dan peranannya dalam mengatasi migrasi ilegal secara menyeluruh dan berkelanjutan.
5. Bagi teman-teman mahasiswa, semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru tentang Strategi Mengatasi Pekerja Migran (PMI) ilegal oleh Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Sehingga, diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa meneliti tentang Peran Kolaboratif BP3MI dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Migrasi Ilegal di Nusa Tenggara Timur.